BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Anak

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat merupakan dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[1]

Indikator kota layak anak merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya menuwjudkan KLA. Menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaketn/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak untuk mewujudkan KLA. Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan

   Telah banyak kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak anak, namun semuanya belum terimplementasi secara optimal, dan masih terdapat berbagai persoalan anak. Selain itu sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kepada anak (guru/ustad, bidan, kader posyandu dan petugas lembaga layanan lainnya) belum semua mendapatkan pelatihan konfensi hak anak (KHA).

   > *"Untuk memperkuat kebijakan kota layak anak, pemerintah menerbitkan peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan perbub nomor 38 tahun 2014 tentang rencana aksi daerah kabupaten*

[1] Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017) 21-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak anak tahun 2014-2018. Selain itu juga adanya dukungan dari masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Tujuannya agar kota layak anak ini bisa memberikan perubahan yang baik untuk Lamongan"[2]

Berikut merupakan peraturan/kebijakan tentang kabupaten/kota layak anak di kabupaten Lamongan:

a. Peraturan daerah kabupaten Lamongan nomor 05 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
b. Peraturan daerah kabupaten Lamongan nomor 10 tahun 2013 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita.
c. Peraturan bupati kabupaten Lamongan nomor 38 tahun 2014 tentang rencana aksi daerah kabupaten layak anak tahun 2014-2018.
d. Instruksi bupati Lamongan nomor 2 tahun 2016 tentang gerakan 1821 dan Lamongan membaca.

2. Hak Sipil dan Kebebasan

Mengetahui bahwa masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, masih ditemukan banyak informasi yang tidak layak yang berakibat terganggunya proses tumbuh kembang anak. Selain itu, forum anak sebagai wahana bagi anak mengekspresikan pendapat, minat, dan bakatnya juga masih belum memadai.

[2] Sri Utami, Wawancara, 11 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Untuk mempercepat agar anak memiliki akta kelahiran pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yaitu dengan mencabut perda tentang retribusi penggantian biaya cetak ktp juga akta kelahiran"*

Upaya yang dilakukan pemerintah agar semua anak di lamongan memiliki akta kelahiran, pemerintah mencabut Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil melalui perda nomor 23 tahun 2014 sebagai upaya percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan akta kelahiran. Selain itu adanya intruksi dari bupati lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang pembebasan retribusi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di kabupaten lamongan.

> *"Untuk fasilitas informasi kami sudah membuat website agar mempermudah bagi setiap masyarakat mengetahui setiap program yang dilaksanakan untuk anak.website ini ditujukan agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam hal pemenuhan hak anak".*[3]

Fasilitas ini dibuktikan dengan adanya fasilitas perpustakaan keliling juga tersedianya layanan telepon sahabat anak (TeSA), program inovasi perpustakaan dimana perpustakaan, KLA Lamongan – YouTube, dan lain sebagainya.

[3] Sri Utami, Wawancara, Lamongan 11 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

   Data pengajuan pernikahan yang masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sejak tahun 2012 hingga tahun ini, tidak terdapat anak laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, semua telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun fenomena perkawinan dibawah tangan tidak terdata. Selain itu terdapat banyak lembaga konsultasi untuk anak, seperti BKB, BKR, dan juga PPT. Disamping itu, terdapat juga LKSA, seperti panti asuhan dan taman penitipan anak.

4. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

   Angka kematian bayi (AKB)/Infant Mortality Rate adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat disuatu wilayah persatu tahun berjalan. Untuk kabupaten Lamongan AKB pada tahun 2012 adalah 2,97/1.000 kelahiran hidup, tahun 2013 4,7/1.000 kelahiran hidup, tahun 2014 4,4/1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu tahun 2012 56,74/100.000 kelahiran hidup, tahun 2013 90.98/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2014 53,99/100.000 kelahiran hidup. Prevalensi gizi kurang, gizi buruk, prevalensi KEP, dan anak pendek pada balita masih terjadi, sesuai tabel 3.5 diatas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan menerbitkan peraturan nomor 10 tahun 2013 tentang kesehatan itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayi baru lahir, bayi dan anak balita Kabupaten Lamongan. Sehingga pelayanan persalinan yang diberikan mampu memberikan perubahan yang signifikan untuk kesehatan baik bayi ataaupun ibu yang melahirkan. Dapat dilihat bahwa, angka kematian bayi dibawah angka nasional, dengan angka kematian pada tahun 2016 sebesar 5,2% lebih kecil dari tahun 2015 sebesar 6,0%. Dan angka kematian ibu melahirkan dibawah angka nasional, dengan angka kematian pada tahun 2016 sebesar 0,06% dan tahun 2015 sebesar 0,07%.

Tabel 4.1

Prosentase Angka Kematian Bayi dan Ibu dibawah Angka Nasional Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Ibu
1	2015	6,0	0,07
2	2016	5,2	0,06

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan pelayanan terbaik agar kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Lamongan dapat terpenuhi.

> *"Sekarang pemerintah mulai memperhatikan tentang kesehatan, ya itu adanya rumah sakit yang mendukung KLA, memerhatikan tentang kesehatan bayi terkait masalah gizi diadakan program pencegahan dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *penanganan masalah gizi dalam bentuk program PELITA, selain itu juga adanya penyediaan layanan mobil sehat"*[4]

Terkait tentang kesehatan, dibuktikan dengan adanya kerjasama BRI dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bantuan mobil ambulan. Selain itu adanya partisipasi Kemintraan dengan Lembaga Masyarakat (PKK) dalam kegiatan pemberian makanan tambahan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan masalah gizi.

> *"Adanya rumah sakit yang ramah anak, seperti ada tempat untuk ibu menyusui. Itukan juga salah satu tujuan agar KLA ini bisa tercapai dari segala aspek".*[5]

Saat ini puskesmas dengan pelayanan ramah anak sampai dengan tahun 2016 sebanyak 8 puskesmas, sedangkan untuk rumah sakit yaitu sebanyak 2 rumah sakit salah satunya RS Soegiri Lamongan. Program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah anak dalam bentuk penyediaan klinik tumbuh kembang anak di rumah sakit. Berikut merupakan tabel anak balita dengan masalah gizi dibawah angka nasional:

[4] Sri Utami, Wawancara, Lamongan 11 September 2017.
[5] Sri Utami, Wawancara, Lamongan 11 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Persentase Jumlah Anak Menurut Kondisi Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Anak Pendek di Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Anak Pendek
1.	2015	0,15	2,3	18,3
2.	2016	0,14	1,3	-

Tersedianya kawasan tanpa rokok, ini sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2013. Diperkuat dengan persentase kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan diatas 90% dengan angka kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 100%. Sedangkan di fasiitas pendidikan dibawah 90% dengan angka kawasan tanpa rokok di fasilitas pendidikan pada tahun 2015 sebesar 65,23%. Kawasan tanpa rokok ini bertujuan agar dapat memberikan ruang bagi perokok aktif dan juga agar kesehatan tetap terjaga terutama ketika ada anak disekeliling otomatis akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan anak. Oleh karena itu disediakan kawasan tanpa rokok.

5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya belum ada kebijakan terkait dengan sekolah ramah anak, namun di daerah sudah ada sekolah yang mengikuti program rintisan pembentukan sekolah ramah anak walaupun secara spesifik belum ada sekolah ramah anak, melalui perwakilan siswa-siswanya yang dikirim untuk menjadi anggota Forum Anak. Ada beberapa sekolah yang telah memiliki kantin kejujuran, namun angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni tahun 2014 di kabupaten Lamongan untuk:

a. Pendidikan PAUD formal dan PAUD non formal mencapai 93,97%.
b. Pendidikan SMP termasuk Paket B APK mencapai 129,67%, APM mencapai 92,77%.
c. Pendidikan SMA termasuk Paket C APK 94,10%, sedangkan APM mencapai 63,47%.

Terkait keamanan bagi siswa dibutuhkan fasilitas berupa zona dan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas untuk memudahkan pelajar/siswa menuju ke sekolah. Dan juga sudah adanya transportasi yang aman dan nyaman bagi anak untuk pergi dan pulang dari sekolah.

> *"Sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengikuti program ramah anak, walaupun masih perlu banyak sosialisasi tentang KLA namun sudah ada dukungan dari beberapa sekolah. Misalnya, SMP Negeri 4 Babat sudah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada sarana transportasi antar jemput ke sekolah sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi anak. Selain itu juga, terkait penyeberangan menuju ke sekolah sudah adanya rambu-rambu agar kendaraan tidak melaju kencang di area sekitar sekolah, sudah ada jasa penyeberangan sehingga bisa mempermudah anak untuk menyeberang. Namun masih perlu banyak lagi rambu-rambu lalu lintas sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk anak. Terkait pendidikan juga ada inovasi gerakan 18-21, gerakan ini bertujuan agar adanya waktu yang luang agar anak bisa berkumpul dengan keluarga".[6]

Gerakan 18-21 ini merupakan inovasi program agar anak dapat berkumpul dengan keluarga pada pukul 18.00 – 21.00 WIB yang bertujuan menuju lamongan berkarakter. Seiring perkembangan teknologi pada era globalisasi di satu sisi menimbulkan dampak positif, namun di sisi lain ada hal yang harus di waspadai. Asyiknya media sosial dan mudahnya mengakses berbagai informasi, terkadang melalaikan peran orang tua sebagai pendamping anak dan kewajiban anak didik yang harus banyak belajar. Gerakan 18-21 ini mengajak masyarakat untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan mematikan TV dan Gadget pada jam efektif bersama keluarga yakni pukul 18.00 – 21.00 WIB.

[6] Zumaroh, Wawancara, Lamongan 12 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menuju Lamongan berkarakter, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

a. Memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak dengan menyediakan waktu bersama anggota keluarga.
b. Mendampingi anak bermain untuk menciptakan keakraban, kedekatan dan saling perhatian antara anak dan orang tua.
c. Mendampingi anak dalam belajar atau menyelesaikan tugas dari sekolah.
d. Menciptakan suasana hangat bersama keluarga agar terjalin komunikasi dan suasana yang harmonis antara anak dan kelarga.
e. Bercengkrama bersama keluarga untuk berbagi tentang pendidikan, pergaulan, moral dan agama.
f. Menceritakan tentang kisah atau dongeng yang mengandung nilai karakter positif bagi perkembangan anak.
g. Mengantarkan anak tidur dengan kecupan kening dan doa.

6. Perlindungan Khusus.

Mengetahui bahwa masih terdapat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lamongan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, maupun eksploitasi, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pemerintah mulai melakukan penurunan angka kekerasan terhadap anak, salah satunya muncul Perda Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2012. Kebijkan yang dikeluarkan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan agar tingkat kekerasan terhadap anak bisa berkurang. Untuk menuju Kota Layak Anak pemerintah memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran melalui Lembaga P2TP2A dan LPA. Selain itu juga adanya sistem penatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran melalui program/aplikasi berbasis web SIMPONI. Selain masalah kekerasan terhadap anak, juga masih terdapat anak-anak yang tidak sekolah dan memasuki dunia kerja dimana ini merupakan anak-anak korban trafficking, anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis, mengamen, anak-anak yang dipekerjakan di pabrik dan home industry (batako, genteng, Giftsun, dsb) menjadi rumah tangga anak, bekerja dipertokoan dan buruh migrant dan bekerja sebagai pemulung. Untuk menangani kasus ini pemerintah melakukan upaya menyediakan Child Guide sebagai SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Adanya sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak bekerja dan anak yang ditarik dari BPTA terintegrasi dengan pencatatan pekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Upaya ini diharapkan agar dapat memperkecil angka dimana anak dibawah usia bekerja dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan penguatan dan kepastian hukum untuk melayani dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu undang-undang tersebut harus dapat terimplementasikan dari hal-hal teknis dan praktis hingga bisa dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan yang dilayani bisa merasakan dampak keberadaan penyelenggaraan pelayanan tersebut.[7] Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh stake holders Lamongan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, antara lain:

1. Lomba balita sehat, lomba kreatifitas anak dan gelar potensi anak, lomba posyandu, lomba PHBS,
2. Pemberian bantuan kepada para siswa kurang mampu, dari Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Lamongan yang dananya berasal dari sumbangan secara rutin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, BUMD dan perusahaan swasta yang berlokasi di Lamongan.
3. Selain Pemerintah Daerah dan sekolah, banyak layanan publik yang menyediakan layanan hotspot untuk koneksi internet secara gratis.

   Sedangkan kegiatan/program terkait dengan pencapaian indikator KLA dalam pelayanan publik adalah:

   1. Telah ada perwakilan anak dari SMA,SMP, pekerja anak, anak panti asuhan, dan anak berhadapan dengan hukum yang telah terlibat dan memeberikan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak,

[7] Samodra Wibawa, Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2009), 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lamongan pada saat ini sekitar 89,79% dari jumlah anak. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk membuat semua anak tercatat adalah: sosialisasi informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil langsung ke desa-desa dan juga ke sekolah-sekolah. Pembagian selebaran/leaflet dan pemasangan spanduk-spanduk di tempat yang strategis.
3. Di daerah masih terjadi perkawinan di bawah umur, tetapi telah juga diupayakan berbagai kegiatan untuk pencegahannya, diantaranya melalui sosialisasi, Workshop dan kegiatan KRR.
4. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan konsultasi dan pengasuhan anak, telah terdapat lembaga layanan yaitu: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan lain-lain, dari tahun ke tahun mengalami penambahan.
5. Telah terdapat fasilitas kreatif dan rekreatif yang mudah diakses oleh anak, seperti:
   - Ruang bermain ramah anak (RBRA) di Alon-alon Lamongan, Telaga Bandung, Telaga Dapur, dan di Desa Kendal Kecamatan Sekaran dalam kondisi baik dan terawat.
   - Adanya kawasan obyek wisata, seperti kawasan rekreasi, wisata religi atau juga terdapat kolam renang di beberapa kecamatan dimana kawasan tersebut biayanya murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kendala Pemerintah Kabupaten Dalam Pemenuhan Hak Terhadap Anak

Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencanan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Kondisi dimana pemerintah dan masyarakat saling berpengaruh dalam pengembangan pemenuhan hak anak. Kota layak anak menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan hak anak. Namun, dalam pemenuhan hak anak masih juga terdapat kendala yang mampu menghambat program tersebut berdasarkan penjelasan dari bu sri utami beliau mengatakan bahwa:

> *"Untuk memenuhinya kita masih perlu banyak dukungan dan juga bantuan terutama pada area sekolah-sekolah masih belum banyak rambu-rambu lalu lintas untuk kawasan sekolah, oleh karena itu seharusnya ada rambu-rambu agar kendaraan yang melewati kawasan sekolah bisa lebih pelan-pelan lagi".*[8]

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa masih belum banyak rambu-rambu lalu lintas disekitar area sekolah. Karena

[8] Sri Utami, Wawancara Lamongan 11 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambu-rambu lalu lintas ini juga diperlukan agar keselamatan dari anak-anak dapat terjamin. Area sekolah harus ada jembatan penyeberangan atau harus ada jasa penyeberangan, terlihat ketika pulang dan pergi ke sekolah anak-anak masih banyak yang takut untuk menyeberangi jalan terlebih sekolah di daerah Lamongan ini tempatnya banyak disebelah jalan raya.

Selain masalah penyeberangan di area sekolah, yang masih menjadi kendala adalah masih belum banyak masyarakat yang mengetahui dimana lamongan ini sudah menjadi kota layak anak oleh karena itu masih perlu banyak sosialisasi yang harus dilakukan. Kemudian berkaitan dengan anak-anak dibawah umur yang bekerja ini juga masih perlu perhatian yang lebih agar bisa berkurang. Yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah bagian dari disnaker lamongan, selain itu juga pihak satpol pp yang memiliki naungan untuk mengamankan anak-anak yang ada dijalanan. Ini menjadi pr bagi pihak pemerintah agar dapat mengurangi tingkat pekerja anak usia dibawah umur dan anak-anak jalanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id